



YAYASAN PENDIDIKAN PANCASAKTI TEGAL  
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LPPM)**

Jl. Halmahera Km. 1 Kota Tegal 52122 Telp/Fax (0283) 351082 – 351267  
email : [lppmupstegal@gmail.com](mailto:lppmupstegal@gmail.com) website : [www.upstegal.ac.id](http://www.upstegal.ac.id)

## SURAT TUGAS

Nomor : 155/K/A-5/LPPM-UPS/II/2021

Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Pancasakti Tegal  
menugaskan kepada :

Nama : 1. Dra. Sri Sutjiatmi, M.Si  
2. Dimas Purbo Pambudi, M.A  
3. Muhammad Nabil

Jabatan : 1. Ketua  
2. Anggota  
3. Anggota

Unit Kerja : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Tugas : Melaksanakan Penelitian dengan Judul : “Penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus BUMDES di Desa Dukuhjati Kidul Kec. Pangkah Kab. Tegal”

Waktu : Oktober 2020 – Oktober 2021

Demikian surat tugas ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.



Tegal, 10 Februari 2021  
Ka LPPM,

Dr. Ir. Suyono, M.Pi  
NIP. 19660115 199303 1 004

**PENGUATAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DI MASA  
PANDEMI COVID-19**

**(STUDI KASUS BUMDES DI DESA DUKUHJATI KIDUL  
KECAMATAN PANGKAH KABUPATEN TEGAL)**



**Oleh:**

**Ketua: Dra. Sri Sutjiatmi, M.Si**

**Anggota: Dimas Purbo Pambudi, M.A.**

**Muhamad Nabil**

**JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL**

## **RINGKASAN**

Usulan penelitian ini akan mengeksplorasi penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di masa pandemi Covid-19 di Desa Dukuhjati Kidul, Kecamatan Pangkah , Kabupaten Tegal. Usulan penelitian berawal dari situasi yang tidak kondusif di segala sendi kehidupan karena terdampak Covid-19. Dampak buruk yang terjadi dirasakan di sektor pendidikan, ekonomi, kesehatan dan sebagainya tidak terkecuali kehidupan masyarakat di Desa Dukuhjati Kidul Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal. Berangkat dari beberapa faktor di atas, usulan ini diajukan untuk mengeksplorasi BUMDES yang ada pada desa tersebut. Peneliti akan melihat sejauh mana keberlanjutan pengelolaan BUMDES yang telah dan akan berjalan, peneliti ingin membuktikan bahwa BUMDES bermanfaat bagi masyarakatnya, manfaat apa saja yang diperoleh juga akan dieksplorasi agar pembaca memperoleh deskripsi yang komprehensif dari penelitian ini. Aturan mengenai BUMDES sendiri ada pada Permendesa PDTT Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa dimaksudkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Penelitian ini akan menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi. Hal-hal yang ingin dieksplorasi secara spesifik adalah kondisi BUMDES pada masa sebelum dan selama Pandemi Covid-19; memastikan kesesuaian antara Permendesa PDTT Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, dan Pengelolaan, dan Pembubaran BUMDES dengan kondisi riil pada objek penelitian; mengeksplorasi keberhasilan dan hambatan managerial oleh Kepala Desa dan adanya dampak positif pada kemandirian ekonomi masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan BUMDES; untuk memastikan apakah telah tercapai tujuan dari BUMDES; dan menarik kesimpulan terkait bagaimana proses pengoptimalan BUMDES dapat menjadi indikator keberhasilan pengelolaannya. Semua tujuan tersebut berusaha dicapai oleh peneliti agar penelitian ini memberikan manfaat ketika dijalankan dan hasilnya dipublikasikan.

## **KATA KUNCI**

Penguatan BUMDES, Pandemi Covid-19, Kemandirian Ekonomi.

## LATAR BELAKANG

Pembangunan pada hakekatnya bertujuan membangun kemandirian, termasuk pembangunan pedesaan. Salah satu misi pemerintah adalah membangun daerah pedesaan yang dapat dicapai melalui pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan produktivitas dan keanekaragaman usaha pedesaan, membangun dan memperkuat institusi yang mendukung rantai produksi dan pemasaran, serta mengoptimalkan sumber daya sebagai dasar pertumbuhan ekonomi pedesaan. Tujuannya, adalah untuk memberi peluang bagi kemampuan daerah dan pedesaan sebagai tulang punggung ekonomi regional dan nasional. Kemajuan ekonomi nasional hanya akan tercapai jika terdapat iklim perekonomian yang baik di tingkat provinsi. Kemajuan ekonomi di tingkat provinsi akan tercapai jika kabupaten memiliki kegiatan ekonomi yang baik. Kemajuan ekonomi sebuah kabupaten dapat tercapai karena adanya sumbang dari ekonomi pedesaan yang kuat berimbas pada kesejahteraan masyarakat luas. Hal ini akan menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang baik untuk diterapkan di semua tingkat pembangunan dan keputusan berdasarkan kebutuhan nyata dari masyarakat. Pembangunan pedesaan merupakan salah satu cara dalam upaya mengentaskan kemiskinan di Indonesia.

Salah satu strategi pembangunan yang dapat dipertimbangkan adalah dengan pendirian Badan Usaha Milik Desa (untuk selanjutnya disingkat BUMDes). Pendirian BUMDES ini disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi desa. Pendirian BUMDes ini dapat dijadikan salah satu strategi yang patut dipertimbangkan dalam upaya pembangunan desa. Bahkan di beberapa wilayah desa lainnya, BUMDES ini telah beroperasi dan memberikan keuntungan serta menambah pemasukan bagi keuangan desa.

Pada dasarnya, BUMDES merupakan institusi ekonomi di tingkat desa yang diupayakan sebagai sarana peningkatan kesejahteraan masyarakat. BUMDES ini menjadi bagian penting dari bentuk pemberdayaan ekonomi masyarakat di tingkat desa sejak dimasukkan dalam UU Nomor 6 Tahun 2014. Bahkan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 meniscayakan kehadiran BUMDes sebagai sentra pengembangan program ekonomi masyarakat dengan mengedepankan prinsip keterbukaan dan bertanggung jawab terhadap masyarakat.<sup>1</sup>

Pendirian BUMDES adalah terobosan baru yang patut diapresiasi. Setidaknya BUMDES menjadi bentuk baru kepemilikan bisnis masyarakat yang dapat mendorong proses

---

<sup>1</sup> Imam Yudhianto Soetopo, 2010, *Mengejawantahkan Peran dan Eksistensi BUMDes*, hlm. 116.

pemerataan ekonomi sampai ke desa-desa yang selama ini seringkali terabaikan. Namun, hal yang perlu ditegaskan dan menjadi perhatian adalah pada saat BUMDES akan didirikan. Ada mekanisme yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang harus dilaksanakan. Hal ini dimaksudkan agar BUMDES berdiri berlandaskan kekuatan hukum sehingga dapat menjalankan aktifitasnya. Desa yang serius memaksimalkan potensi BUMDES akan menuangkan aturan formalnya dalam Peraturan Desa.

Badan Usaha Milik Desa yang ada di Desa Dukuhjati Kidul Kecamatan Pangkah Kabupaten Brebes bernama 'Karya Bersama', sejauh ini telah terkelola dengan baik. Peraturan yang mengaturnya tercantum pada Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa. Pembentukan BUMDES di Desa Dukuhjati Kidul ini utamanya bertujuan untuk meningkatkan perekonomian desa dengan mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat Desa. Berdasarkan tujuan utama yang ingin dicapai oleh BUMDES, ruang lingkup usaha Badan Usaha Milik Desa "KARYA BERSAMA" pun meliputi seluruh jenis usaha baik bidang simpan pinjam, jasa/ persewaan dan lain-lain yang dilakukan melalui musyawarah Desa (Pasal 6 ayat 2).<sup>2</sup>

Agar dapat mencapai tujuan tersebut banyak hal yang telah dilakukan oleh Badan Usaha Milik Desa salah satunya adalah memaksimalkan potensi pada peternakan sapi. Tujuan khusus penelitian ini adalah untuk membuka cakrawala pengetahuan berbagai pihak baik dari kalangan akademis, maupun masyarakat umum. Secara substantif, penelitian ini ditujukan untuk memberikan pemahaman mendalam terhadap suatu konten dan konteks dari kebijakan tentang Pendirian, Pengurusan, dan Pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa. Urgensi penelitian ini karena diperlukan sebuah riset studi untuk membuktikan apakah benar kebijakan BUMDes telah berhasil sebagai program pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan dimasa pandemi Covid-19 ini,

Skema dalam penelitian ini adalah peneliti menggunakan metode observasi (peneliti terlibat langsung), data terkait pelaksanaan BUMDes bersumber dari data *soft* dan *hard* file, kemudian peneliti melakukan interpretasi data agar lebih mudah dipahami. Apabila divisualisasikan, skema usulan penelitian akan seperti pada skema. Penelitian ini dimulai dengan melihat dan memahami dasar kebijakan/ peraturan yang melandasi Badan Usaha Milik Desa. Setelah dasar pelaksanaan dapat dipahami, peneliti melakukan observasi pada objek penelitian terkait pelaksanaan BUMDes. Setelah terjadi pandemic dan sebelum terjadi, wawancara dan mengetahui berbagai data yang ada maka peneliti menyimpulkan hasil penelitian yang bersifat evaluatif terkait proses pelaksanaan dan pemanfaatan BUMDes dimasa pandemic covid-19.

---

<sup>2</sup> Peraturan Desa No. 5 Tahun 2017 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **1. Desa dan Badan Usaha Milik Desa**

Desa menurut UU Nomor 6 Tahun 2014 (UU Desa), definisi *desa* adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sebagai wakil negara, desa wajib melakukan pembangunan, baik pembangunan fisik maupun pembangunan sumber daya manusia, sebagai upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Pembangunan desa yang berkelanjutan merupakan pembangunan desa yang tidak merusak lingkungan dan memberi hak kedaulatan untuk mengatur dirinya. Masyarakat desa harus berdaya agar pembangunan mencapai sasarannya. Maka yang diperlukan adalah upaya-upaya pemberdayaan masyarakat desa untuk membangun kemampuan masyarakat desa dengan cara mendorong, memotivasi, dan mengembangkan potensi sumber daya lokal yang dimiliki

Badan Usaha Milik Desa adalah badan usaha yang seluruh atau Sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola asset, jasa pelayanan, dan usaha lain untuk sebesar-besarnya bafi kesejahteraan masyarakat desa. Sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, BUMDES lahir sebagai suatu pendekatan baru dalam usaha peningkatan ekonomi desa berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Pengelolaan BUMDES sepenuhnya dilaksanakan oleh masyarakat desa, yaitu dari desa, oleh desa, dan untuk desa. Cara Kerja BUMDES adalah dengan jalan menampung kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat dalam sebuah bentuk kelembagaan atau badan usaha yang dikelola secara professional, namun tetap bersandar pada potensi asli desa. Hal ini dapat menjadikan usaha masyarakat lebih produktif dan efektif. Kedepan BUMDES akan berfungsi sebagai pilar kemandirian bangsa yang sekaligus menjadi lembaga yang menampung kegiatan ekonomi masyarakat yang berkembang menurut ciri khas desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) bertujuan sebagai lokomotif pembangunan ekonomi lokal tingkat desa. Pembangunan ekonomi lokal desa ini didasarkan

oleh kebutuhan, potensi, kapasitas desa, dan penyertaan modal dari pemerintah desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan desa dengan tujuan akhirnya adalah meningkatkan taraf ekonomi masyarakat desa. Dasar pembentukan BUMDES sebagai lokomotif pembangunan di desa lebih dilatarbelakangi pada prakarsa pemerintah dan masyarakat desa dengan berdasarkan pada prinsip kooperatif, partisipatif, dan emansipatif dari masyarakat desa.

BUMDES juga merupakan perwujudan partisipasi masyarakat desa secara keseluruhan, sehingga tidak menciptakan model usaha yang dikuasai oleh kelompok tertentu di tingkat desa. Artinya, tata aturan yang terwujud adalah mekanisme kelembagaan yang solid. Penguatan kapasitas kelembagaan akan mengarah pada adanya tata aturan yang mengikat seluruh anggota. Dengan adanya BUMDES diharapkan mampu meningkatkan pembangunan yang berdampak bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat desa yang nantinya akan menjadi kesejahteraan nasional.

Di dalam Buku Panduan BUMDES yang diterbitkan oleh kementerian Pendidikan Nasional tahun 2007 dijelaskan secara terperinci bahwa ada beberapa tahapan dalam proses pendirian BUMDES. Selain itu juga dijelaskan mengenai cara dan syarat pendirian BUMDES yang terdiri atas:

1. Pendirian BUMDES berdasar pada Perda Kabupaten
2. Diatur berdasarkan Perdes
3. Satu Desa, hanya terdapat satu BUMDES
4. Pemkab memfasilitasi pendirian BUMDES
5. BUMDES dapat didirikan dalam bentuk Usaha Bersama atau bentuk lainnya, tetapi bukan Koperasi, PT, Badan Usaha Milik Desa, CV, UD, atau lembaga keuangan (BPR).

Dalam peraturan Menteri Desa No. 4/2015 pasal 5 juga menjelaskan mengenai proses pendirian BUMDES yang berbunyi “Pendirian BUMDES sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 disepakati melalui Musyawarah Desa, sebagaimana diatur dalam peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Pedoman Tata tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa”. Musyawarah Desa yang dimaksud pada pasal tersebut membahas beberapa hal yang terkait dengan proses pendirian desa. Inti pokok bahasannya adalah:

1. Pendirian BUMDES Desa sesuai dengan Kondisi ekonomi dan social budaya masyarakat.
2. Organisasi pengelola BUMDES

### 3. Modal Usaha BUMDES

### 4. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDES.

Empat Inti pokok bahasan inilah yang kemudian menjadi darsar pedoman bagi Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk menetapkan Peraturan Desa tentang Pendirian BUMDES. Selanjutnya mengenai pengelolaan BUMDES, Permendesa No. 4/2015 mengatur secara jelas dan detail mengenai pengelolaan teknis pelaksanaan BUMDES disertai dengan peran dan fungsi dari masing-masing perangkat BUMDES, memang isi Permendesa No.4/2015 ini berlaku umum, artinya tetap saja dalam pelaksanaan di daerah harus ada penyesuaian yang kemudian diatur oleh peraturan Bupati/Walikota sesuai dengan keadaan alam, lingkungan, dan budaya setempat.

Pengelolaan BUMDES harus dikelola secara professional dan mandiri sehingga diperlukan orang-orang yang memiliki kompetensi untuk mengelolanya. Perekrutan pegawai ataupun manajer dan selevel harus disesuaikan dengan standar yang sudah ditetapkan dari AD/ART BUMDES. Sebagai sebuah lembaga yang juga diwajibkan mendapat profit, tentunya ada mekanisme yang harus ditaati oleh pengelola BUMDES dalam melakukan kerjasama dengan pihak lain. Misalnya kegiatan yang bersifat lintas desa perlu dilakukan koordinasi dan kerjasama antar pemerintah Desa dalam Pemanfaatan sumber-sumber ekonomi, misalnya sumber air bagi air minum. Dalam melakukan Kerjasama dengan pihak ketiga oleh pengelola harus dengan konsultasi dan persetujuan Dewan Komisaris BUMDES. Dalam kegiatan harian pengelola harus mengacu pada tata aturan yang sudah disepakati bersama sebagaimana yang telah tertuang dalam AD/ART BUMDES, serta sesuai prinsip-prinsip tata kelola BUMDES.

Satu hal yang penting dalam pengelolaan BUMDES yakni dalam proses pengelolaan BUMDES amat dibutuhkan suatu pengelolaan dan pelaporan yang transparan bagi

pemerintah dan masyarakat. Artinya dasar pengelolaan harus serba transparan dan terbuka sehingga ada mekanisme *chek and balances* baik oleh pemerintahan desa maupun masyarakat. Untuk langkah ke depan sangat diperlukan buah penyusunan Rencana-Rencana pengembangan usaha. Contoh yang dapat di ambil, untuk penjualan produk-produk yang dipengaruhi oleh musim, seperti penjualan pakaian, sandal, sepatu, dan sejenisnya penting untuk selalu memperhatikan perubahan mode, sebab jika tidak dilakukan



besar kemungkinan produknya tidak diminati oleh pasar, untuk itu diperlukan inovasi baru atau selalu mewaspadai perubahan dan perkembangan yang terjadi di masyarakat.

Desa Dukuhjati Kidul merupakan desa yang dikembangkan dan berpeluang berkembang menjadi masyarakat desa yang kreatif, inovatif, dan produktif. Sebagian kebutuhan dana bagi pengembangan Desa Dukuhjati Kidul diperoleh dari kebutuhan

Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dukuhjati Kidul. Berjalannya waktu Desa Dukuhjati Kidul mulai mengalami perkembangan, oleh masyarakat, pembangunan daerah, dan tingkat produktif masyarakat meningkat. Untuk menjalankan hal tersebut Pemerintah Daerah berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Tegal terkait aturan yang menjadi acuan dalam pembentukan Badan Usaha Milik Desa yang ada di daerahnya. Fokus penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi bagaimana upaya penguatan BUMDES yang dilakukan Pemdes sebagai upaya untuk membangun desa dan menyejahterakan masyarakat desa nya.

## **METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini akan menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan sebuah studi kasus. Metode kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi (Sugiyono, 2016). Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna. Penelitian kualitatif dilakukan pada kondisi yang alamiah, lebih bersifat deskriptif data yang terkumpul berbentuk kata-kata atau gambar sehingga tidak menekankan angka, menekankan pada proses, analisis data secara induktif dan lebih menekankan makna (data dibalik yang teramati). Maka dari itu, penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan studi kasus untuk mengevaluasi pelaksanaan Badan Usaha Milik Desa berfokus pada penguatan BUMDES selama masa Pandemi.

Studi kasus (*case study*) merupakan salah satu metode penelitian yang banyak digunakan dalam evaluasi program. Robert K. Yin menyatakan studi kasus merupakan cerita mengenai sesuatu yang unik, khusus, menarik-cerita tersebut dapat mengenai individu-individu, proses, program-program, rukun tetangga, institusi-institusi dan bahkan kejadian-kejadian (Yin, 2009). Dalam penelitian ini digunakan studi kasus untuk melihat, mendalami dan mengeksplorasi penguatan Badan Usaha Milik Desa khususnya mengenai pelaksanaan dan

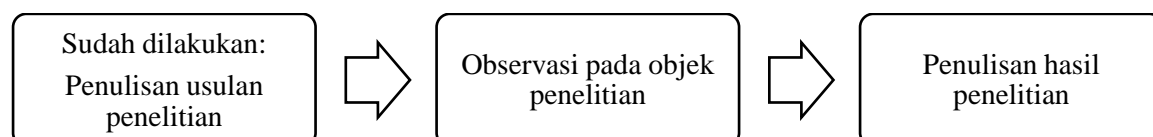
manfaat sebelum dan sesudah terjadi covid-19. Studi kasus dipilih karena unit analisis akan menjadi lebih spesifik (khusus) agar memberikan hasil penelitian yang mendalam, dan guna mendapatkan gambaran yang komprehensif yaitu di BUMDES Karya Bersama Desa Dukuhjati Kidul, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal.

## OBJEK PENELITIAN DAN SAMPEL

Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi, tetapi oleh Spradley dinamakan “*social situation*” atau situasi sosial yang terdiri atas tiga elemen yaitu: tempat (*place*), pelaku (*actors*) dan aktivitas (*activity*) yang berinteraksi secara sinergis. Situasi sosial tersebut dinyatakan sebagai obyek penelitian yang ingin diketahui ‘apa yang terjadi’ di dalamnya. Pada situasi sosial atau obyek penelitian ini peneliti dapat mengamati secara mendalam aktivitas (*activity*) orang-orang (*actors*) yang ada pada tempat (*places*) tertentu.

Dalam penelitian ini, teknik sampling yang digunakan adalah *Nonprobability Sampling*. Teknik tersebut adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan peluang/ kesempatan yang sama bagi setiap unsur/ anggota objek penelitian untuk dipilih menjadi sampel. Teknik sampel yang spesifik dalam penelitian ini adalah *purposive sampling* karena pengambilan sampel data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut dianggap paling tahu apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek/ situasi sosial yang diteliti.<sup>3</sup> Maka dari itu, penelitian ini menggunakan *purposive sampling* karena sampel yang akan digunakan adalah beberapa informan yang telah graduasi dari pelaku usaha, serta menentukan lokus penelitian dengan kriteria daerah yang paling optimal dalam BUMDes.

Berdasarkan penjelasan metode penelitian, objek penelitian, calon informan , beberapa proses akan dilakukan untuk menindaklanjuti usulan penelitian ini yang meliputi Observasi pada objek penelitian dan proses selanjutnya di akhir adalah penulisan hasil penelitian. Singkatnya, alir penelitian dari awal, proses observasi hingga akhir pada tahap penulisan hasil penelitian jika gambarkan sebagai berikut:



Dalam penulisan usulan penelitian ini, telah dilakukan pra observasi namun hanya sebatas *interview* sekilas terkait kondisi/ pelaksanaan BUMDes di desa Dukuhjati Kidul yang ada di wilayah kerja Kec. Pangkah. Maka dari itu, diperlukan langkah selanjutnya untuk melengkapi dan menyempurnakan tahapan proses penelitian mendatang. Usulan penelitian ini akan ditindaklanjuti dengan beberapa tahapan/ proses. Apabila usulan penelitian ini telah disetujui, maka peneliti akan mengurus perizinan penelitian untuk memulai observasi. Observasi awal adalah kepada Kades Dukuhjati Kidul, Kec. Pangkah dengan target mendapatkan data awal tentang BUMDes di desa tersebut. Setelah data pelaksanaan kegiatan didapatkan, observasi dilanjutkan kepada beberapa Pendamping yang wilayah dampungannya terdapat BUMDes untuk mendapatkan data dan keterangan mengenai proses pelaksanaannya, dan lain-lain. Setelah mendapatkan keterangan yang menguatkan untuk menentukan objek penelitian spesifik (satu desa tertentu atau beberapa desa), maka observasi dilanjutkan kepada para pelaku usaha yang terdampak dengan target dapat melakukan wawancara mendalam untuk memperoleh data terkait proses graduasi dan sebagainya. Sehingga, pada akhir tahapan data yang telah diperoleh dari berbagai pihak dapat digunakan sebagai bahan mengevaluasi, menyajikan data, dan melakukan penulisan hasil penelitian sesuai dengan apa yang ditargetkan.

Dalam rangka menyelesaikan semua tahapan usulan penelitian di atas, ada beberapa tugas yang akan dijalankan oleh peneliti. Tugas anggota pengusul sesuai tahapan penelitian adalah menindaklanjuti usulan penelitian, melakukan observasi, dan menuliskan hasil penelitian. Semua tahapan penelitian seperti yang telah dijalankan di atas akan dilakukan oleh satu orang (dalam hal ini yang mengusulkan penelitian). Maka dari itu, semua tahapan dan proses dalam penelitian ini membutuhkan alokasi waktu yang memadai.

## JADWAL

No	Nama Kegiatan	Bulan											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Penyusunan instrumen	√											
2	Pengumpulan data dan Penyusunan laporan		√	√									
3	Penulisan hasil penelitian dan Publikasi				√	√	√						

Alokasi waktu yang memadai sangat dibutuhkan untuk menindaklanjuti usulan penelitian ini, hal tersebut dikarenakan perlunya untuk mengeksplorasi keterangan jawaban, data dan makna yang disampaikan para informan. Sehingga, peneliti harus jeli untuk mengartikan makna dibalik kata-kata yang disampaikan para informan. Dengan kejelian,

keuletan dan cara berpikir kritis yang dilakukan peneliti ketika observasi akan menghasilkan hasil penelitian yang komprehensif sehingga hasil penelitian ini dapat terpublikasi dan memberikan pengetahuan kepada para pembacanya.

## BIAYA

No	Nama Kegiatan	Biaya			
		Volume	Satuan	Harga Satuan	Total (Rp)
1	Alat tulis (Kertas, Bolpoint, Buku Catatan)				Rp. 100.000
2	Transportasi Riset				Rp. 500.000
3	Konsumsi penyusunan instrumen penelitian				RP. 400.000

## DAFTAR PUSTAKA

Imam Yudhianto Soetopo, 2010, *Mengejawantahkan Peran dan Eksistensi BUMDes*, hlm. 116.

Peraturan Desa No. 5 Tahun 2017 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (Desa Dukuhjati Kidul, Kec. Pangkah, Kab. Tegal).

Permendesa PDTT Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa

Sugiyono. 2016. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung. Alfabeta. Hlm 1-3.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Yin, Robert K. 2009. *Case Study Research Design: Design and Methods*. 4th.ed. Sanfrancisco, CA: Sage Publication.